

## Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia

Buku ini merupakan sebuah antologi berbagai tulisan yang berasal dari bidang multidisiplin terkait dengan studi perbatasan negara (border studies). Ruang lingkup materi yang termuat dalam buku ini berada pada pengelolaan kawasan perbatasan negara di Indonesia. Buku ini akan menyajikan pemikiran serta beberapa inovasi riset baik dalam bidang ilmu sains dan teknologi maupun ilmu humaniora. Pada akhirnya, diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun kawasan perbatasan baik dalam aspek keamanan (security), kesejahteraan (prosperity), sampai aspek keberlanjutan (sustainability). Pengelolaan perbatasan negara Indonesia saat ini dan kedepan, perlu mengoptimalkan kerjasama pentahelix dimana peran perguruan tinggi dan berbagai sektor lain sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti dengan munculnya buku ini yang menandai eksistensi para ilmuwan perbatasan negara dari berbagai bidang, berkumpul dan menghasilkan karya ilmiah. Para ilmuwan tersebut tergabung dalam FORPERTAS (Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara Indonesia) yang merupakan wadah dalam berdiskusi untuk menghasilkan buku ini. Disamping itu, dukungan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP) Republik Indonesia menjadi sangat penting sebagai promotor dalam penyelesaian buku ini. Studi perbatasan negara merupakan bidang yang sangat kompleks, oleh sebab itu, materi dalam buku ini akan menyajikan berbagai perspektif, baik yang berasal dari bidang ilmu geografi, pembangunan wilayah, hubungan internasional, sosiologi, hukum internasional, politik, sampai dengan ilmu pertanian dan keteknikan lainnya. Adanya buku ini, diharapkan mampu memberikan perspektif secara komprehensif untuk para pemangku kepentingan, sehingga Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia dapat menjawab amanah konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Selamat Membaca dan Belajar Cara Pandang Secara Multidisiplin.



Badan Nasional  
Pengelolaan Perbatasan  
Republik Indonesia

Forum  
Perguruan Tinggi Untuk Perbatasan  
(FOPERTAS)



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

Jl. Sendok, Karangayam CT VIII, Caturtunggal,  
Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281  
Telp./Fax.: 0274 561037, Mobile/WA: 081 228 47 8888  
• ugmprss • @ugmprss • ugmprss.ugm.ac.id



Editor: Junita Budi Rahman

Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia

# Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia

Penulis :

Suratman, Muhamad Fadhil Nurdin, dkk; Agung Satriyo Nugroho; Garuda Wiko, dkk;  
Prita Amalia, dkk; Yogi Suprayogi Sugandi, dkk; Koesrianti; Randi; Niko Azhari Hidayat, dkk.  
Susanna Nurdjaman, dkk; Sugeng Heri Suseno, dkk; Albertus Girik Alo; Nur Hidayat Sardini  
Laila Kholid Alfidaus; Elyta, dkk; Chairil Nur Siregar, dkk; Baiq Wardhani; Dewi Apri Astuti, dkk.  
Dewi Erowati Supli, dkk; Irman Irawan; Fitriyana

Editor :

Junita Budi Rahman



GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA.....</b>	<b>v</b>
<b>SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA KETUA FORUM PERGURUAN TINGGI UNTUK PERBATASAN NEGARA (FORPERTAS) .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGANTAR SUMBANGSIH FORUM PERGURUAN TINGGI UNTUK PERBATASAN NEGARA (FOPERTAS) BAGI INDONESIA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAGIAN I PEMIKIRAN DAN GAGASAN UNTUK KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
<b>1 Inovasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan .....</b>	<b>3</b>
<i>Oleh: Suratman</i>	
<b>2 Refleksi Perbatasan Indonesia: Tantangan dan Strategi Masa Depan.....</b>	<b>13</b>
<i>Oleh: Muhamad Fadhil Nurdin, Tofan Rachmat Zaky &amp; Budiman Pohan</i>	
<b>3 Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia (Sebuah Novelty Konsep dan Teori) .....</b>	<b>26</b>
<i>Oleh: Agung Satriyo Nugroho</i>	
<b>4 Penanganan Isu Perbatasan dalam Perspektif Politik dan Hukum Berbasis Digitalisasi.....</b>	<b>42</b>
<i>Oleh: Garuda Wiko, Elyta &amp; Fuzy Firda Zhan</i>	
<b>5 Peluang Peningkatan Investasi di Kawasan Perbatasan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja .....</b>	<b>56</b>
<i>Oleh: Prita Amalia, Imam Mulyana, R. Adi Nurzaman, &amp; Wahyu Agung Laksono</i>	

<b>6</b>	<b>Menggagas Governansi Perbatasan Maritim Indonesia: Perspektif dari Laut Natuna Utara.....</b>	<b>75</b>
	<i>Oleh: Yogi Suprayogi Sugandi, Arfn Sudirman, &amp; Sayed Fauzan Riyadi</i>	
<b>7</b>	<b>Kerja Sama Zona Ekonomi Khusus Perbatasan: Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan RI</b>	<b>98</b>
	<i>Oleh: Koesrianti</i>	
<b>8</b>	<b>Model Pembangunan Pendidikan Daerah Perbatasan Indonesia (Perspektif Sosiologi Pendidikan).....</b>	<b>118</b>
	<i>Oleh: Randi</i>	
<b>9</b>	<b>Harapan Kesehatan Digital Tanpa Batas di Daerah Perbatasan.....</b>	<b>128</b>
	<i>Oleh: Niko Azhari Hidayat, Abed Nego Okthara Sebayang, Fadillah Willis Triyayuda &amp; Safardi Samsa</i>	
<b>10</b>	<b>Teknologi Pemanfaatan Sabut Kelapa (Prosapa) sebagai Solusi Erosi Pantai di Pesisir Pulau-Pulau Terdepan....</b>	<b>144</b>
	<i>Oleh: Susanna Nurdjaman &amp; Andi Egon</i>	
<b>11</b>	<b>Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dari Limbah Batok Kelapa untuk Pulau-Pulau Terdepan Indonesia .....</b>	<b>158</b>
	<i>Oleh: Susanna Nurdjaman dan Faizal Ade R. Abdullah</i>	
<b>12</b>	<b>Kajian Ikan Laut dalam sebagai Sumber Pangan dan Suplemen Kesehatan Warga Perbatasan Indonesia.....</b>	<b>168</b>
	<i>Oleh: Sugeng Heri Suseno, Agus Yulianto, Adenia Cahyatie Aprillia, &amp; Desi Listiana</i>	
<b>BAGIAN II DINAMIKAKAWASAN-KAWASANPERBATASAN INDONESIA .....</b>		<b>191</b>
<b>13</b>	<b>Strategi Pembagunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua .....</b>	<b>193</b>
	<i>Oleh: Suratman dan Albertus Girik Allo</i>	
<b>14</b>	<b>Kawasan Nusa Utara Silang Budaya: Serpihan Dinamika Perbatasan Indonesia dan Filipina .....</b>	<b>210</b>
	<i>Oleh: Nur Hidayat Sardini</i>	
<b>15</b>	<b>Imajinasi Tentang Perbatasan Masyarakat Daerah Tertinggal, Anak Muda dan Pemberdayaan.....</b>	<b>226</b>
	<i>Oleh: Laila Kholid Alfirdaus</i>	

<b>16 Model Penguatan Aktivitas Ekspor Melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong Indonesia dan Kompleks Imigresen Tebedu Malaysia .....</b>	<b>241</b>
<i>Oleh: Elyta &amp; Dadang Ilham Kurniawan Mujiono</i>	
<b>17 Inovasi Teknologi Berbasis Smart Power untuk Keamanan Perbatasan Negara: Studi di Perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste</b>	<b>254</b>
<i>Oleh: Chairil Nur Siregar &amp; Epin Saepudin</i>	
<b>18 De-Elitisasi Asean salam Diskursus De/(Re)Konstruksi Identitas Transspasial di Pulau Sebatik .....</b>	<b>271</b>
<i>Oleh: Baiq Wardhani</i>	
<b>19 Integrated Farming Berbasis Kedele-Tempe-Cempe untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Daerah Perbatasan.....</b>	<b>287</b>
<i>Oleh: Dewi Apri Astuti dan Made Astawan</i>	
<b>20 Nasionalisme sebagai Tantangan Masyarakat di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura .....</b>	<b>309</b>
<i>Oleh: Dewi Erowati</i>	
<b>21 Manfaat Pembangunan Kawasan Perbatasan Entikong Dalam Perspektif Keamanan Manusia (Human Security)</b>	<b>324</b>
<i>Oleh: Nur Aslamiah Supli dan Azhar</i>	
<b>22 Kemandirian Pangan Di Kawasan Perbatasan Ri-Malaysia Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Perbatasan Krayan) .....</b>	<b>346</b>
<i>Oleh: Irman Irawan</i>	
<b>23 Analisis Pendapatan Nelayan Perbatasan RI – Malaysia Sebelum dan pada Masa Pandemi COVID – 19 di Pulau Sebatik .....</b>	<b>360</b>
<i>Oleh: Fitriyana</i>	
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>375</b>

## MANFAAT PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ENTIKONG DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA (*HUMAN SECURITY*)

*Oleh: Nur Aslamiah Supli dan Azhar*

### **Pendahuluan**

Entikong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang memiliki jalur perbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia. Jalur darat ini dikenal juga dengan sebutan Jalur Sutera karena keberadaan jalur tersebut dimanfaatkan sebagai pintu keluar masuknya manusia dan barang-barang dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya. Meskipun aktivitas pergerakan barang dan manusia cukup tinggi, sampai dengan 2014 lalu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong berada dalam kondisi yang kurang baik. Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada perdagangan barang dan jasa lintas negara (Caritra.org., 2017). Arus aktivitas ekonomi yang tinggi di perbatasan ini harusnya memengaruhi perekonomian masyarakat, akan tetapi nyatanya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi Entikong dengan kawasan negara tetangga begitu jelas terlihat. Sangat disayangkan, kawasan perbatasan Indonesia yang bisa dikatakan beranda depan atau wajah negara malah terkesan seperti halaman belakang (*Backyard*) yang kurang terurus (Kominfo.go.id., 2016).

Menurut Rahatmawati dan Wahyuni (2012) terdapat tujuh masalah yang terjadi di kawasan perbatasan Entikong antara lain: 1) isu geografis-teritorial, terdapat batas-batas wilayah darat maupun laut yang belum disepakati oleh Indonesia dan negara tetangga; 2) isu keamanan dan kedaulatan seperti tren

kejahatan lintas batas yang tinggi meliputi perdagangan dan penyeludupan obat-obatan terlarang (*drug trafficking*), manusia (*human trafficking*), bahan-bahan makanan, kayu dan garis batas negara yang kabur karena wilayah nasional yang berkurang; 3) Isu lingkungan meliputi kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) baik yang legal maupun ilegal (*illegal logging*); 4) Isu kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, pendidikan serta kesehatan; 5) Isu koordinasi antara pemerintah lokal dan pusat terbatas oleh jarak, belum meratanya pembangunan (pembangunan hanya terfokus pada pusat pertumbuhan/kota; 6) Isu kependudukan dan perubahan sosial yang disebabkan oleh migrasi legal dan ilegal; dan 7) Isu ketahanan nasional terkait persepsi masyarakat yang merasa di anaktirikan (Rahatmawati dan Wahyuni, 2012:17–18)

Menyadari itu pemerintah terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan kawasan perbatasan yang dasari oleh Nawa Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar kebijakan ini Pemerintah merenovasi dan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN ini digunakan sebagai pos pemeriksaan lalu lintas barang dan orang yang keluar masuk wilayah batas negara Indonesia yang meliputi keimigrasian, kepabeanan, karantina keamanan dan lain-lain (Hutamakarya, 2019). Pembangunan ini dilakukan dalam beberapa tahap, tahap awal pemerintah membangun PLBN dan sarana penunjang zona inti seperti bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, *car wash*, *check point* serta *hardscape* dan *landscape* kawasan. Investasi total untuk pembangunan dan renovasi ini adalah Rp. 152,491 Miliar (Kppip.go.id., 2016). Pembangunan tahap kedua adalah zona sub inti dan pendukung berupa pembangunan perumahan petugas, keimigrasian, karantina dan pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola dan pekerjaan pendukung lainnya (Himawan dan Hapsari Kusumo, 2017). Total anggaran untuk pembangunan tahap kedua mencapai Rp. 421 Miliar (Maulana, 2018). Pemerintah juga membangun Terminal Barang Internasional (TBI) di dekat PLBN Entikong agar memperlancar arus barang internasional di wilayah perbatasan. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ini adalah Rp. 134,38 Milyar (Maulana, 2018).

Selain itu pemerintah membangun jalan paralel perbatasan, jalan menuju pos lintas batas, dan pengembangan infrastruktur pemukiman, yaitu jalan lingkungan, drainase dan pengelolaan sampah dan air minum (Hutapea, 2018). Pemerintah juga membuat Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) agar masyarakat mendapatkan pembebasan Bea Masuk atas barang pribadi yang dibawa dari negara tetangga sampai dengan batas nilai pabean maksimal MYR 600/orang/bulan untuk yang melewati batas darat (*land border*) dan maksimal MYR 600/perahu setiap trip yang melewati batas lautan (*sea border*). Jika melewati batas nilai pabean, maka kelebihan akan dipungut biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor (KPPBC TMP Tanjung emas, 2014). Usaha-usaha ini dilakukan dengan harapan PLBN Entikong tidak hanya menjadi gerbang masuk, melainkan embrio pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Memahami konteks permasalahan dan pembangunan kawasan perbatasan Entikong, maka menjadi penting untuk memperjelas isu ini melalui pertanyaan: Bagaimana dampak pembangunan kawasan perbatasan Entikong terhadap keamanan, kesejahteraan dan perekonomian rakyat? Apakah pembangunan ini mampu untuk mengatasi semua tujuh masalah yang teridentifikasi sebelumnya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji manfaat pembangunan fasilitas tersebut bagi masyarakat di kawasan Entikong dalam perspektif keamanan manusia (*human security*), merumuskan sebuah gagasan untuk memahami sisi positif dan negatif dari pembangunan kawasan tersebut, serta melihat prospektif ke depan. Peneliti yakin masih banyak hal-hal yang luput dari pandangan pemerintah. Tentunya dibutuhkan kerja sama dua arah baik dari pihak pemerintah dan masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat lokal, agar pencapaian tujuan dapat diraih sesuai rencana.

### **Kerangka Konsep: Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Keamanan manusia pertama kali diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1994 dalam *Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia) (Sudiar 2018). Konsep ini juga menunjukkan studi keamanan telah bertransformasi, yang semula berfokus pada kajian tradisional berkuat pada keamanan nasional yang bersifat militeristis menjadi kajian non tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural dan konflik sosial budaya. Meskipun

begitu keamanan manusia tidak menghapuskan ataupun menggantikan keamanan tradisional dan keamanan nasional, akan tetapi melengkapinya. Keselamatan dan kesejahteraan manusia dianggap sebagai bagian integral dari pencapaian perdamaian dan keamanan yang lebih luas atau global. Sehingga secara singkatnya, konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian bukan hanya wilayah atau kedaulatan. Menyelesaikan masalah dengan pendekatan keamanan manusia akan memungkinkan pemerintah untuk mampu memerangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks memahami pembangunan perbatasan dengan pendekatan keamanan manusia, maka kebijakan yang dibuat pemerintah setidaknya harus memenuhi atau paling tidak mendekati tujuh komponen keamanan manusia, yaitu keamanan mencakup ekonomi (*Economic security*), makanan (*Food security*), kesehatan (*Health Security*), lingkungan (*Environmental Security*), personal (*Personal Security*), komunitas (*Community Security*), dan politik (*Political Security*) (Human Security Unit of the United Nation, 2016:7). Tujuh komponen ini berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Maknanya jika dapat memenuhi satu komponen maka komponen lainnya dapat dicapai dengan mudah. Sebagai contoh, jika pemerintah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja dengan pendapatan yang baik, maka masyarakat akan memiliki ekonomi cukup atau bahkan lebih baik. Agar mencapai tingkatan masyarakat sejahtera dan aman, dibutuhkan usaha keberlanjutan dari pemerintah yang dapat menunjang konektivitas ini terus berjalan dengan baik. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat yang sejahtera ini mendapatkan akses yang mudah terhadap makanan yang sehat, bergizi, akses perawatan kesehatan dan pendidikan.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mana peneliti menekankan pada penjelasan tentang asal usul masalah sesuai fakta dan disajikan dalam bentuk deskripsi atau alur sistematis. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, arsip pemerintah, dan hasil pencarian *online*.



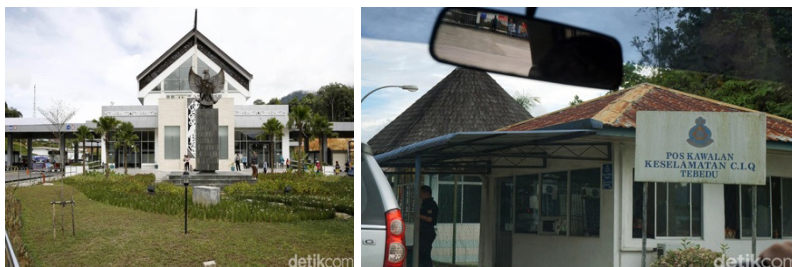
## **Hasil dan Pembahasan: Sisi Positif dan Negatif Pembangunan di Kawasan Entikong**

Sebaik-baiknya pembangunan adalah pembangunan yang mampu membawa perubahan yang kehidupan yang baik bagi masyarakatnya. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembangunan dan renovasi di kawasan Entikong telah memberikan banyak perubahan yang memberikan banyak dampak, baik dampak positif maupun negatif. Perubahan berdampak positif telah membuka harapan dan prospek masa depan yang baik untuk Provinsi Kalimantan Barat terkhusus Kecamatan Entikong. Perubahan berdampak negatif diperkirakan akan mengganggu proses kelancaran pembangunan kawasan sehingga harus segera diatasi. Pembahasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

### **Sisi Positif**

Manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat Entikong setelah pembangunan antara lain memberikan kebanggaan tersendiri untuk kawasan, antara lain penampilan baru pada pintu perbatasan Indonesia yang cantik dan lebih nyaman, serta memberikan Terminal Barang Internasional (TBI). Yang terakhir ini, menjadikan Entikong kawasan perbatasan pertama yang memiliki TBI untuk mendukung aktivitas ekspor-impor antarnegara, memberikan sarana penunjang dan infrastruktur di Desa Entikong, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, puskesmas, gedung sekolah dan pasar tradisional. Pembangunan ini telah menyumbangkan wisatawan terutama wisatawan mancanegara (Wisman).

Pembangunan telah memberikan warna-warni baru terutama untuk PLBN Entikong. Bangunan modern dan Ornamen-ornamen khas Kalimantan seperti tameng-tameng dari masyarakat Dayak, Rumah Panjang adat Dayak dan pajangan ornamen lainnya yang membuat PLBN terlihat megah, menjadi lebih cantik dan menarik wisatawan datang untuk berkunjung. Biasanya para pelintas asal negara tetangga hanya lewat untuk berwisata kuliner ke Pontianak atau Singkawang, namun sekarang mereka menyempatkan diri untuk mampir dan mengambil gambar di depan Gedung PLBN Entikong (Ajeng 2019). Johannes (2019) berpendapat, pembangunan di pusat Kecamatan Entikong terlihat lebih megah jika dibandingkan dengan Gedung PLBN Malaysia di Tebedu (Johannes 2019:57). Menurut Menteri PURP, Pak Basuki Hadimuljono, PLBN Entikong telah membuat negara tetangga iri dan bahkan memicu pengusaha negara Malaysia protes untuk meminta dibangun PLBN seperti Indonesia di Malaysia (Prabowo 2017).



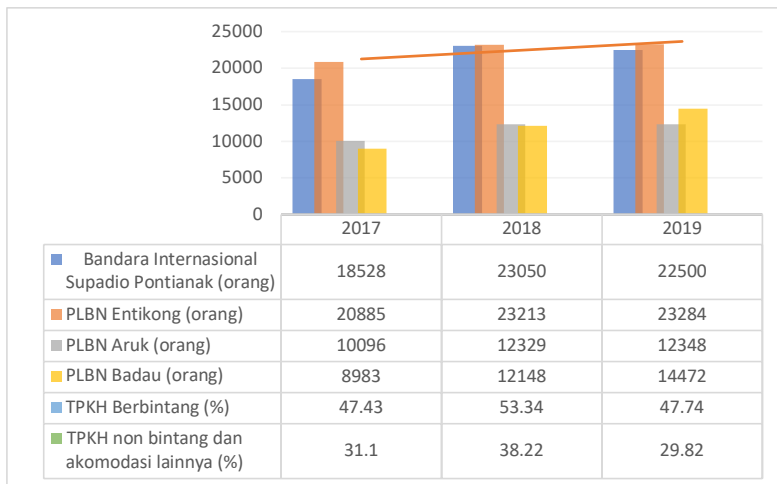
**Gambar 1 dan 2.** Perbedaan Pos Lintas Batas Entikong (Indonesia) dan Tebedu Malaysia

**Sumber:** (Damarjati 2017)

Perbedaan yang sangat kentara ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat Kawasan Entikong. Kualitas jalan yang telah menjadi lebih baik dari sebelumnya telah menjadikan PLBN Entikong pintu utama yang dipilih oleh Wisman untuk berkunjung ke Indonesia. Data statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2021), kunjungan Wisman ke Kalimantan Barat didominasi oleh pintu darat, PLBN Entikong (Lihat Grafik 1.) Meskipun tren kunjungan wisman terus meningkat dari tahun ke tahun, namun keadaan ini tidak mendorong industri perhotelan di Entikong. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kalimantan Barat masih rendah untuk hotel berbintang maupun non bintang. TPK hotel sempat naik di tahun 2018, namun kembali turun di tahun 2019 meskipun total kunjungan di tahun 2019 lebih tinggi (72604 wisman) dibanding tahun 2018 (70740 wisman). Peneliti menemukan, terdapat 15 penginapan/hotel di kawasan Entikong. Rata-rata berbintang 1-2 dan non bintang berkelas melati. 15 Penginapan itu lebih dekat dengan PLBN Entikong dan rata-rata berjarak 1 jam dari kota Entikong.

Dari pengalaman Indonesia selama ini, sektor pariwisata merupakan sektor andalan dan banyak menyumbang devisa negara. Data ini telah menunjukkan bahwa Entikong memiliki potensi devisa untuk negara. Pemerintah Indonesia selanjutnya harus membangun industri perhotelan di kawasan ini, karena hotel/penginapan merupakan tiang penting penunjang industri pariwisata yang berarti tanpanya sektor pariwisata akan sulit berkembang. Sayangnya, selama tiga tahun (2017-2019) Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan ini, sehingga kehilangan potensi devisa dari TPK hotel dari wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Meskipun pada pembangunan tahap kedua pemerintah telah membangun Wisma Indonesia (setara dengan hotel bintang 3) di kawasan PLBN Entikong pada tahun

2020. Kehadiran satu Wisma tidak akan mampu memberikan akomodasi jika angka kunjungan wisatawan masih sama atau lebih dari angka kunjungan di tahun 2017–2019.



**Grafik 1.** Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2017–2021

**Sumber :** Badan Pusat Statistik (2021)

Menurut hemat peneliti, fasilitas yang dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk menunjang akomodasi penginapan kawasan Entikong adalah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun di 2006 silam. Saat ini Rusunawa ini kondisinya memprihatinkan, terlantar dan rusak. Rusunawa itu semula ditawarkan untuk tempat tinggal sewa untuk warga yang bekerja di perbatasan, namun karena belum didukung infrastruktur seperti listrik, maka fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan warga. 2011 silam banyak warga yang tertarik untuk tinggal di sana, namun listrik dan air bersih tidak tersedia sehingga mereka mengurungkan rencananya. Air di Rusunawa ini tidak mengalir ke kamar sehingga harus mengambil air sendiri ke tempat penampungan. Sedangkan untuk listrik, Pemerintah setempat telah membeli generator set. Namun generator set sangat boros untuk setiap harinya yang menghabiskan 20 liter solar, sehingga generator hanya dinyalakan tiga atau empat jam sejak petang (Kompas.com 2011). Rusunawa memiliki potensi untuk menjadi kawasan penginapan wisatawan, pemerintah sebaiknya segera melakukan renovasi Rusunawa ini agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kawasan Entikong daripada dibiarkan terlantar dan seperti kawasan tanpa penghuni.



**Gambar 2.** Rusunawa terlantar

**Sumber:** Kabar.Sanggau.go.id (2021)

Entikong sejatinya memiliki destinasi pariwisata yang menarik dan eksotis seperti Wisata Alam Pancur Aji di Sanggau. Kawasan wisata tersebut merupakan hutan lindung yang memiliki beragam flora langka seperti kayu tengkawang dan tanaman anggrek dan juga satwa langka, seperti orang hutan dan aneka burung termasuk burung khas Kalimantan, yaitu burung Enggang. Wisata Pancur Aji juga memiliki pesona air pegunungan, seperti Sungai Merobu, Engkuli, Bayu, Kenian, Setapang, Mongan dan Mawang. Fasilitas wisata itu juga telah dilengkapi dengan gazebo, toilet, lahan parkir dan berbagai wahana (Prawitaningrum 2019). Potensi pariwisata ini akan lebih lengkap jika ditunjang dengan kehadiran hotel/penginapan yang berkelas dan berbintang. Selain itu, fungsi hotel/penginapan tidak hanya terbatas pada fasilitas untuk menginap. Hotel juga dapat memberikan fasilitas untuk pertemuan bisnis, seminar, *meeting* dan acara pribadi, seperti ulang tahun dan pernikahan. Jika fasilitas ini diadakan, bukan tidak mungkin masyarakat lokal maupun mancanegara akan mampir untuk kepentingan-kepentingan tersebut.

Dampak positif lainnya adalah Entikong kini menjadi kawasan perbatasan pertama yang memiliki Terminal Barang Internasional (TBI). Dengan fasilitas ini, ekspor dan impor tidak lagi harus melalui Jakarta atau

Pontianak tetapi dapat langsung ke TBI Entikong. Terminal ini diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat setempat yang bermata pencarian sebagai buruh panggul barang. Sebelum ini, hampir setiap hari masyarakat Indonesia bekerja di terminal barang Malaysia. Mereka mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari banyaknya aktivitas bongkar muat barang di terminal Malaysia. Namun pemerintah Malaysia telah mengadakan penertiban, melarang buruh panggul barang dari Indonesia untuk bekerja disana.

### **Sisi Negatif**

Dari pembahasan di atas, diketahui pembangunan di Entikong telah memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat Entikong. Namun, setiap pembangunan tidak luput dari sisi negatifnya. Peneliti menemukan beberapa dampak negatif dari pembangunan di Entikong, bahwa pembangunan tidak memberikan dampak yang menyeluruh sehingga masih belum dapat memenuhi kebutuhan primer masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan ini juga telah menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena ganti rugi pembebasan lahan belum dipenuhi oleh pemerintah. Dalam bidang keamanan, pembangunan ini tidak serta merta mengurangi intensitas kejahatan lintas batas.

Tujuan renovasi ulang PLBN Entikong adalah menjadi pusat kegiatan ekonomi perbatasan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membuat pelebaran jalan dari PLBN Entikong sampai ke Balai karangan. Kini pembangunan telah selesai, lahan masyarakat yang terdampak belum mendapatkan ganti rugi. Banyak dari warga Entikong mulai menagih janji pembayaran lahan mereka yang terdampak pembangunan infrastruktur, terutama yang ada di PLBN Entikong. Pada tanggal 29 April 2021, perwakilan ahli waris pemilik tanah di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat melakukan portal jalan lintas Malindo antar negara. Dalam aksi tersebut mereka menyatakan agar pemerintah segera membayarkan ganti rugi sebesar Rp 715 Juta. Mereka sudah memperjuangkan ganti rugi jalan tersebut, baik dengan cara persuasif hingga melalui jalur hukum, yaitu pengadilan. Pada tingkat pengadilan mereka telah memenangkan gugatan pada November 2020 silam, namun belum juga mendapatkan pembayaran (Rahmat 2021). Satu bulan setelahnya, 18 Mei 2021, 162 pemilik lahan yang terdampak pembangunan dan pelebaran jalan menuju Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menuntut

pembayaran ganti rugi. Mereka telah menunggu empat tahun, tetapi ganti rugi belum juga dibayar. Raden Nurdin selaku perwakilan mengirimkan surat untuk Presiden melalui radarkalbar.com. Selain meminta bantuan Presiden untuk memberikan ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan jalan, surat ini juga menceritakan pembangunan jalan yang belum rampung. Pembangunan jalan yang semuanya akan dilebarkan dari 5 meter menjadi 20 meter, dan sepanjang jalan PLBN Entikong sampai Balai karangan, baru dikerjakan sampai 5 Km. Pembangunan itu secara fisik belum rapi dan belum tuntas. (Radarkalbar.com 2021). Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka tidak hanya akan mengancam keamanan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga mengancam stabilitas politik kawasan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada sisi lain, jalan yang telah dibuat itu tidak mencapai masyarakat di daerah. Sampai saat ini, 2 dari lima desa Kecamatan Entikong masih memiliki kesulitan akses jalan. Entikong memiliki 5 desa, yaitu desa suruh Tembawang (3.322 penduduk), Entikong (9.493 Penduduk), Nekan (2.717 Penduduk), Semanget (2.675 Penduduk) dan Pala Pasang (1.023). Pada **Tabel 1**. Terlihat hanya Desa Entikong, desa Nekan, dan desa Semanget yang dapat mengakses jalan dengan perjalanan normal. Sarana transportasi yang digunakan dapat berupa mobil atau ojek motor, selain mereka juga dapat berjalan kaki. Jarak tempuh yang paling dekat dari PLBN Entikong adalah Desa Entikong (1,9 Km, 4 menit berkendara mobil), Desa Semanget (27.8 Km, 42 Menit berkendara mobil) dan Desa Nekan (35,9 Km, 56 Menit berkendara Mobil) Melalui jalan lintas Malindo (Googlemaps.com,2021). Sedangkan untuk Desa Tembawang dan Desa Pala Pasang tidak memiliki akses tersebut. Sarana transportasi perjalanan mereka adalah sungai dan darat (jalan kaki melalui jalan tikus). Menurut kepala desa Suruh Tembawang, dibutuhkan waktu minimal 9 jam untuk menuju desa ini dari Entikong, dan ongkos perjalanannya bisa menembus Rp. 1 Juta. Desa ini akan lebih dekat jika ditempuh lewat Malaysia 2 jam berjalan kaki (Damarjati 2017). Sedangkan Desa Pala Pasang dapat diakses dari Entikong melalui jalur sungai Sekayam dan jalur darat melalui jalan paralel perbatasan yang menghubungkan kecamatan Entikong ke kecamatan Sidding, Kabupaten Bengkayang. Tidak diketahui waktu yang dibutuhkan jika melewati jalur sungai, tapi jalur darat menghabiskan waktu 2,5 jam dengan kecepatan yang cukup laju (Chornelius 2019).

**Tabel 1.** Batas Wilayah Desa di Kecamatan Entikong dan Sarana Transportasi 2019

Desa	Utara	Selatan	Barat	Timur	Sarana Transportasi	Perjalanan
Nekan	Desa Entikong	Kec. Sekayam	Desa Entikong	Desa Engkahan	Darat	Normal
Semanget	Desa Entikong	Desa Nekan	Desa Nekan	Malaysia	Darat	Normal
Entikong	Malaysia	Desa Nekan	Desa Pala Pasang	Desa Semanget	Darat dan Air	Normal
Suruh Tembawang	Malaysia	Kab. Bengkayang	Kab. Bengkayang	Kab. Bengkayang	Darat dan Air	Sulit
Pala Pasang	Malaysia	Kab. Landak	Desa Suruh Tembawang	Desa Entikong	Darat dan Air	Sulit

**Sumber :**Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (2020)

Yosada (2020) menemukan selain akses terbatas, kebijakan pemerintah tidak menunjang semua kawasan, hasil keuntungan dari PLBN hanya diterima pusat sedangkan daerah tidak mendapat bagian (Yosada 2020:154). Terlebih lagi semua sarana dan prasarana ekonomi seperti kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen dan semi permanen di Kecamatan Entikong, Bank Umum Pemerintah dan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) hanya berada di Desa Entikong (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau 2020). Kelemahan-kelemahan ini akhirnya mengakibatkan kebocoran perekonomian Indonesia. Masyarakat di Kecamatan Entikong lebih banyak menjual hasil pertanian mereka dipasar Malaysia. Nilai jual barang akan lebih bernilai tinggi dibandingkan harus ke pusat yang jarak tempuh jauh dan lebih mahal karena tambahan biaya transportasi (Johannes 2019:57). Niko (2019) menemukan banyak warga dari Suruh Tembawang tidak mengetahui tentang pembangunan TBI di Entikong. Masyarakat Suruh Tembawang yang mata pencarian utamanya adalah petani lebih banyak menjual hasil perkebunan mereka, seperti lada (komoditi unggulan Entikong), terung asam, jahe, kacang tanah, jagung, pisang, durian, rambutan, langsung, cempedak, dan lain-lainnya di Kampung Gun Sapit, wilayah Kuching, Sarawak, Malaysia (Niko dan Samkamaria 2019:109). Masyarakat Desa Suruh Tembawang juga lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat Gun Sapit daripada dengan Masyarakat desa Entikong (Niko dan Samkamaria 2019:110). Tak heran jika terjadi perpindahan kewarganegaraan secara masif dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Malaysia (WNA), seperti contoh penduduk dusun Gun Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Hampir separuh warga atau 300 orang atau 65 Kepala Keluarga (KK) berpindah menjadi warga negara Malaysia. Saat ini hanya tersisa 175 orang dengan 33 KK (Nur Aini 2018). Zulkifli, Latif dan Karmila (2017) berpendapat, bila ini terus terjadi maka akan timbul *polarization effect*, yaitu sumber daya alam dan manusia tertarik meninggalkan negara ke negara lain yang berakibat kosongnya kegiatan ekonomi di negara asal sumber daya tersebut (Zulkifli; Latief, Abdul; Karmilia, 2017:64–65).

Keterbatasan infrastruktur di Kecamatan Entikong juga mempengaruhi akses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Saat ini Kecamatan Entikong memiliki 28 sekolah 4 empat di antaranya sekolah Swasta, 24 sekolah Negeri dan 1 Perguruan Tinggi Swasta. Dari **Tabel 2.** dapat terlihat hanya Desa Entikong yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap dari jenjang terendah hingga perguruan tinggi. Sedangkan desa-desa lain hanya memiliki satu hingga dua tingkatan. Sesuai peraturan pemerintah jumlah Rasio Guru



dan Murid di Kecamatan Entikong sudah memadai (dilihat dari **Tabel.3**) (Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17, Rasio minimal antara Guru dan Peserta didik SD/SMP atau sederajat 1:20, untuk MI/MTs atau sederajat 1:15, untuk SMA/SMK atau sederajat 1:20 dan untuk MA/MAK atau sederajat 1:15 dan 1:12). Permasalahan fatal saat ini terletak pada akses sekolah. Tidak mudah bagi anak-anak desa Suruh Tembawang dan Desa Pala Palang melanjutkan Pendidikan ke tingkat SMA karena tingkat kesulitan untuk mencapai fasilitas pendidikan itu adalah sulit untuk Desa Suruh Tembawang dan sangat sulit untuk Desa Pala Palang (Lihat **Tabel 4.**). Jumlah total murid SD di Kecamatan Entikong menunjukkan adanya minat untuk belajar yang tinggi. Pemerintah harus segera mengupayakan infrastruktur jalan yang baik agar generasi masa depan Entikong ini tidak terancam putus sekolah.

**Tabel 2.** Banyaknya Sekolah Menurut Desa di Kecamatan Entikong (2019)

Desa/Kelurahan	SD		MI		SMP		MTs		SMA		MA		SMK		PT	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
Nekan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semanget	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	4	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
Suruh Tembawang	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pala Pasang	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	18	1	-	1	5	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (2020)

Keterangan: Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi); N: Negeri; S: Swasta.

**Tabel 3.** Banyaknya Murid dan Guru di Kecamatan Entikong Tahun Ajaran 2017/2018 Semester 2

Desa /Kelurahan	SD/MI		Ruang Belajar SD/MI		SMP/ MTs		Ruang Belajar SMP/MTs		SMA /SMK/MA						Ruang Belajar SMA/SMK/MA		
	M	G	N	G	M	G	N	G	M	N	M	S	G	N	S	N	S
Nekan	293	22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semanget	345	21	18	363	19	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	803	32	33	297	21	12	495	77	32	3	16	3	-	-	-	-	-
Suruh Tembawang	464	40	33	120	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pala Pasang	143	13	12	34	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2048	128	115	814	56	28	495	77	32	3	-	-	-	-	-	-	-

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (2020)

Keterangan : Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi; N : Negeri; S: Swasta; M: Murid; G:Guru

**Tabel 4.** Kemudahan Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa Yang Tidak Ada Sarana Pendidikan (2019)

Desa/Kelurahan	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	PT
Nekan	-	M	M	M	M	M	M	M
Semanget	-	M	-	-	M	M	M	M
Entikong	-	-	-	-	SM	M	-	-
Suruh Tembawang	-	S	-	S	S	S	S	S
Pala Pasang	-	SS	-	SS	SS	SS	SS	SS

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (2020)

Keterangan: Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi); N : Negeri; S: Swasta SM: Sangat Mudah; M: Mudah; S: Sulit; SS: Sangat Sulit

Keterbatasan lain yang dimiliki Kecamatan Entikong adalah tidak memiliki Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik/Balai Pengobatan. Sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Entikong hanya terbatas pada 1 Puskesmas, 1 Puskesmas Pembantu, 1 Puskesmas Keliling, 1 Praktek Dokter, 5 Praktek Bidan, 31 Posyandu, 5 Polindes, 1 Poskesdes, 1 Apotek dan 1 Toko Obat. Sedangkan untuk tenaga medis totalnya berjumlah 34 tenaga medis/paramedis, 2 orang di antaranya adalah dokter umum, 16 bidan dan 16 perawat. Sebaran tenaga medis/paramedis ini juga tidak ideal (**Tabel 6.**) Menurut Wakil Menteri Kesehatan (2017) dalam Laskmiarti, Budisuari dan Ardani (2014) Rasio dokter terhadap penduduk yang ideal adalah 1:2.500, yang artinya satu dokter mampu untuk melayani 2.500 penduduk (Laksmiarti, Budisuari, dan Ardani 2014:357). Dari Tabel 5. Hanya desa Entikong yang memiliki 2 dokter umum. Jika disesuaikan dengan total penduduk desa Entikong di Tabel 6. maka Entikong masih membutuhkan 2 dokter umum lagi, dan 4 desa lain membutuhkan paling tidak 2 dokter untuk desa Nekan, Semanget dan Suruh Tembawang, dan 1 Dokter untuk Desa Pala Pasang.

**Tabel 5.** Tenaga Kesehatan di Kecamatan Entikong Menurut Desa 2019

Desa/Kelurahan	Dokter	Bidan	Perawat
Nekan	-	1	-
Semanget	-	1	-
Entikong	2	11	15
Suruh Tembawang	-	2	1
Pala Pasang	-	1	-
Jumlah	2	16	-

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (2020)

**Tabel 6.** Jumlah Penduduk di Kecamatan Entikong Menurut Jenis Kelamin

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Nekan	1412	1305	2717
Semanget	1377	1298	2675
Entikong	5024	4469	9493
Pala Pasang	530	493	1023
Suruh Tembang	1747	1575	3322
Jumlah	10090	9140	19230

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (2020)

Menurut Laksmiarti, Budisuari, dan Ardani (2014), dengan fasilitas kesehatan perbatasan masih kurang memadai dan tenaga kesehatan yang terbatas. Masyarakat perbatasan lebih memilih berobat ke negara Malaysia. Masyarakat yang secara lebih ekonomi lebih mampu memilih untuk berobat ke rumah sakit di Malaysia dibandingkan rumah sakit ibu kota (Laksmiarti, Budisuari, dan Ardani 2014:361). Masyarakat perbatasan lebih puas dengan pelayanan kesehatan di Malaysia. Selain mereka tidak perlu menggunakan paspor untuk akses kesehatan (bisa memakai ktp/akta kelahiran), pembayaran biaya rumah sakit terjangkau dan bisa diangsur, pelayanan perawatnya juga baik, tidak mengantre, ruang tunggu bersih dan nyaman. Masyarakat hanya ke puskesmas jika merasa sakit ringan seperti flu (Laksmiarti, Budisuari, dan Ardani 2014:359-360).

Dalam konteks keamanan, tindak kejahatan lokal dan lintas batas di Entikong juga masih tinggi. Kegiatan ilegal bisa ditekan di pintu resmi tapi terus berjalan di perbatasan non resmi (Yosada 2020:155). Menurut Elyta (2020) penyeludupan narkoba di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia mengalami peningkatan setiap tahunnya (Elyta 2020:100). Perdagangan narkoba meningkat karena tidak terkontrolnya aktivitas dan lalu lintas barang/orang di jalur-jalur tikus, penegakan hukum yang masih

lemah serta aparat yang korupsi telah memungkinkan pelaku kejahatan untuk dapat berdagang narkoba dari balik jeruji penjara (Elyta 2020:105).

Selain perdagangan narkoba, kasus pembalakan liar dan perdagangan manusia juga termasuk dalam kategori paling sering terjadi di Entikong. Kedua kejahatan ini juga tidak jarang dilakukan terang-terangan. Menurut Irewati (2016) sulit untuk membedakan aktivitas perdagangan kayu yang ilegal dan legal karena kegiatan ilegal sering dilakukan terang-terangan. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, Irewati menemukan keterlibatan banyak pihak, seperti masyarakat, pengangkut, broker, oknum aparat keamanan atau aparat pembuat dokumen formal, pengawas pelabuhan, perusahaan kayu dan cukong/pemodal. Kelompok ini biasa dikategorikan sebagai mafia kayu ilegal (Irewati, 2016:90). Irewati (2016) juga mengatakan penegakan hukum di Indonesia masih rendah dalam menindak pembalakan liar, pengawasan sengaja diperlonggar demi mempermudah aktivitas transaksi penyeludupan kayu-kayu ilegal secara terang-terangan. Selain itu kelompok kejahatan organisasi mampu untuk mempekerjakan para profesional untuk melancarkan dan melindungi operasi ilegalnya, seperti akuntan, pengacara, hakim, penasihat, keuangan, bangkir, politisi korup, pebisnis bahkan aparat keamanan seperti polisi dan tentara (Irewati, 2016:86). Ketegangan politik negara juga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil pembalakan kayu ilegal (Irewati, 2016:87).

Kasus perdagangan manusia di Entikong tinggi. Hal ini disebabkan banyak dari Penduduk di Kecamatan Entikong mau menjadi pekerja migran di Malaysia meskipun menjadi pekerja migran ilegal (Rahatmawati dan Wahyuni 2012:15). Sesuai dengan pepatah lama, di mana ada kemauan, di sana ada jalan, kemauan masyarakat Entikong yang kuat untuk bekerja di Malaysia telah mengakibatkan mereka menghalalkan segala cara. Seperti kejadian Mei 2019 lalu, saat pelaku kejahatan penyelundupan manusia mencoba untuk menyeludupkan tiga warga Entikong ke Malaysia untuk bekerja di perusahaan sawit. Dua dari tiga korban rela untuk bersembunyi di bagasi belakang mobil dan ditumpuk bersamaan dengan tas bawaan. Parahnya lagi dua dari tiga korban tersebut masih dibawah umur (Putra, 2020).

Perdagangan lintas batas ilegal lainnya yang marak terjadi di Perbatasan Kalimantan Barat ini adalah penyeludupan bahan makanan. Menurut Kristi, Damayanti dan Haqqi (2018) diperkirakan penyeludupan gula dari Malaysia ke Indonesia melalui perbatasan Kalimantan ini mencapai

angka 30 ton sampai 50 ton perhariannya (hal. 44). Masyarakat sering kali memberikan komisi kepada polisi di pos penjagaan perbatasan agar lewat dari pemeriksaan saat membawa barang seludupannya (hal. 48). Selain itu Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) telah disalahgunakan oleh oknum pelaku usaha. Menurut Rahmad (2018) pelaku usaha mengkolektifkan KILB yang dimiliki masyarakat sehingga pelaku dapat berbelanja lebih dari batas nilai pabean perorangan/bulan/per trip. Usaha tersebut dipermudah dengan bekerja sama dengan oknum PPLB sehingga pelaku dapat dengan mudah membawa masuk barang yang akan dia perdagangkan (Kartono, 2018) .

## **Prospek ke Depan**

Dari kacamata *Human Security* pembangunan dan renovasi oleh pemerintah belum mampu untuk mengatasi 7 (tujuh) permasalahan yang teridentifikasi di latar belakang. Permasalahan di Entikong cukup kompleks, kondisi geografi, demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, infrastruktur yang terbatas telah menjadi kendala dalam membangun kawasan ini. Selain itu beberapa penyakit birokrasi seperti korupsi, kebijakan yang tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah menambah kompleksitas masalah di Entikong. Harus ada keseimbangan antara dana yang dikucurkan untuk kota dan daerah di Entikong sehingga masyarakat di kawasan desa tidak merasa di anak tiri-kan.

Pembangunan PLBN Entikong yang megah telah menghabiskan banyak anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Jika ditinjau dari konsep kemegahan dan keindahan, Indonesia berhasil mengintimidasi negara Malaysia. Namun jika dilihat dari konsep keamanan manusia, pembangunan tidak merata menyebabkan hampir semua komponen keamanan belum terpenuhi. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan kebutuhan masyarakat, dibutuhkan pengembangan kawasan yang terpadu dan komprehensif sehingga fungsi pembangunan optimal. Jangan sampai terjebak pada stigma “kawasan perbatasan tidak terawat dan terlihat seperti halaman belakang (*Backyard*)” sehingga habis-habisan memoles wajah perbatasan dan melupakan aspek-aspek penting kehidupan masyarakat Perbatasan Entikong, Indonesia.

Indonesia juga sebaiknya menyegerakan pembangunan jalan-jalan untuk menghubungkan kampung-kampung yang tidak terjamah dengan pusat ekonomi Entikong guna menekan insentif pada daerah untuk melakukan kejahatan lintas batas. Pemerintah juga harus membenahi dan menertibkan jalan-jalan tikus yang ada untuk menekan angka

penyeludupan barang/jasa. Selain itu, intensitas penyeludupan juga memiliki korelasi dengan pola pikir (*mindset*) masyarakat yang terjepit ekonomi. Kebocoran ekonomi ini menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengganggu kedaulatan, dan bahkan nasionalisme masyarakat. Diperlukannya sosialisasi dengan pendekatan kecintaan tanah air serta dukungan ekonomi yang baik agar orientasi masyarakat tidak lagi mengarah pada ketergantungan dan hubungan baiknya dengan negara tetangga, lebih menghargai tanah air dan bangsa serta terjamin perekonomiannya.

## **Simpulan**

Pada dasarnya pembangunan ini telah memberikan dampak-dampak positif untuk kawasan terutama dalam menampilkan potensi-potensi kawasan. Pembangunan kawasan Entikong telah banyak menghabiskan anggaran negara namun belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat kawasan tersebut. Masih perlunya pembenahan dan perluasan sasaran pembangunan terutama pada infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta regulasi efektif dari pemerintah. Saat ini sarana-sarana seperti TBI dan Pasar Tradisional belum terlihat memberikan manfaat, karena selain belum berjalan dengan efektif, masih banyak masyarakat daerah tidak mengetahui pembangunan ini. Pemerintah juga diharapkan memperhitungkan kembali pembangunan yang dilakukan. Kegagalan investasi yang dilakukan sebaiknya menjadi pembelajaran ke depan agar menjadi lebih baik lagi. Pemborosan yang tidak perlu juga baiknya dihindari agar pembangunan kawasan mencakup semua aspek yang diperlukan oleh masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

- Ajeng. 2019. "Tambah Cantik, PLBN Entikong Justru Jadi Tempat Favorit Wisatawan." Diambil 4 Agustus 2021 (<https://www.idntimes.com/travel/destination/kementerian-pariwisata/plbn-entikong-jadi-tempat-favorit-wisatawan-csc/4>).
- Badan Pusat Statistik. 2021. "Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017 - sekarang." Diambil 6 Agustus 2021 (<https://www.bps.go.id/indicator/16/1150/3/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2017---sekarang.html>).

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2020. *Kecamatan Entikong dalam Angka*.
- Caritra.org. 2017. “Entikong, Jalur Sutera Indonesia-Malaysia.” Diambil 3 Agustus 2021 (<https://www.caritra.org/2017/04/06/entikong-jalur-sutera-indonesia-malaysia/>).
- Chornelius, Hendri. 2019. “Perjalanan Tribun Pontianak ke Desa Pala Pasang, dari Jalur Darat Hingga Jalur Air.” Diambil 5 Agustus 2021 (<https://pontianak.tribunnews.com/2019/04/16/perjalanan-tribun-pontianak-ke-desa-pala-pasang-dari-jalur-darat-hingga-jalur-air>).
- Damarjati, Danu. 2017. “Melihat Perbedaan Pos Lintas Batas Entikong dengan Tebedu Malaysia.” Diambil 4 Agustus 2021 (<https://news.detik.com/berita/d-3613296/melihat-perbedaan-pos-lintas-batas-entikong-dengan-tebedu-malaysia>).
- Elyta. 2020. “Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia.” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia IX(2):100–115*.
- Himawan, Adhitya, dan Dian Hapsari Kusumo. 2017. “Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Tahap II 7 PLBN.” Diambil 8 Agustus 2021 (<https://www.suara.com/bisnis/2017/03/21/125009/kementerian-pupr-lanjutkan-pembangunan-tahap-ii-7-plbn>).
- Human Security Unit of the United Nation. 2016. *Human Security Handbook : An integrated approach for the realization of the SDG's*.
- Hutamakarya. 2019. “Plbn Entikong Di Tapal Batas, Cermin Cantik Ibu Pertiwi.” Diambil 6 Agustus 2021 (<https://hutamakarya.com/old/production/public/en/plbn-entikong-di-tapal-batas-cermin-cantik-ibu-pertiwi>).
- Irewati, Awani. 2016. “Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Ilegal Logging di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.” *Jurnal Penelitian Politik 2(1):85–96*.
- Johannes, Ayu Widowati. 2019. “Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 4(2):50–61*. doi: 10.33701/jipsk.v4i2.763.
- Kabar.sanggau.go.id. 2021. “Telantar, Rusunawa Entikong di Perbatasan Indonesia-Malaysia - Kabar Sanggau.” Diambil 5 Agustus 2021 (<https://kabar.sanggau.go.id/telantar-rusunawa-entikong-di-perbatasan-indonesia-malaysia/>).



- Kartono, Rahmad. 2018. "Penyalah Gunaan Kartu Identitas Lintas Batas Dalam Rangka Perdagangan Bebas Di Entikong Sehubungan Dengan Perjanjian Sosek-Malindo." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3(3).
- Kominfo.go.id. 2016. "Kesejahteraan Untuk Semua." Diambil 3 Agustus 2021 ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/8242/kesejahteraan-untuk-semua/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8242/kesejahteraan-untuk-semua/0/kerja_nyata)).
- Kompas.com. 2011. "Tidak Ada Listrik, Rusunawa Telantar." Diambil 5 Agustus 2021 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2011/05/05/03543033/tidak.ada.listrik.rusunawa.telantar>).
- KPPBC TMP TANJUNG EMAS. 2014. "Impor Barang Pelintas Batas - Bea Cukai Tanjung Emas." Diambil 6 Agustus 2021 (<https://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-pelintas-batas/>).
- Kppip.go.id. 2016. "Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Entikong, Kab. Sanggau - KPPIP." Diambil 8 Agustus 2021 (<https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/i-sektor-plbn/pembangunan-pos-lintas-batas-negara-plbn-sarana-penunjang-entikong-kab-sanggau/>).
- Kristi, Prisma; Damayanti, Christy; Haqqi, Haliffa. 2018. "Border Diplomacy Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Gula Di Entikong." *Transformasi* I(34):1–87.
- Laksmiarti, Turniani, Made Budisuari, dan Irfan Ardani. 2014. "Pilihan Pelayanan Kesehatan oleh Masyarakat Perbatasan Negara (Sebuah Analisis Kebijakan)." *People's Health Service Preference at the State Borders [A Policy Analysis]* 17(4):353–62. doi: 10.22435/bpsk.v17i4.
- Maulana, Rivki. 2018. "Pembangunan PLBN Entikong Tahap II Rampung Oktober 2019 - Ekonomi Bisnis.com." Diambil 8 Agustus 2021 (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180817/45/829148/pembangunan-plbn-entikong-tahap-ii-rampung-oktober-2019>).
- Niko, Nikodemus, dan Samkamaria. 2019. "Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan." *Indonesian Journal of Religion and Society* 1(2):104–14. doi: 10.36256/ijrs.v1i2.65.
- Nur Aini. 2018. "Separuh Dusun Di Perbatasan Memilih Jadi Warga Negara Malaysia." Diambil 25 Juli 2021 (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/11/06/phr513382-separuh-warga-dusun-di-perbatasan-pilih-jadi-warga-malaysia>).
- Prabowo, Dani. 2017. "Basuki: Malaysia Iri dengan PLBN Entikong." Diambil 4 Agustus 2021 (<https://properti.kompas.com/>)

- read/2017/08/10/214438521/basuki--malaysia-iri-dengan-plbn-entikong).
- Prawitaningrum, Raras. 2019. "Wisatawan Kepincut Wisata Alam Pancur Aji di Entikong." Diambil 8 Agustus 2021 (<https://travel.detik.com/travel-news/d-4519079/wisatawan-kepincut-wisata-alam-pancur-aji-di-entikong>).
- Putra, Ade. 2020. "Imigrasi Entikong Bongkar Modus Baru Penyelundupan Manusia ke Malaysia." Diambil 3 Agustus 2021 (<https://news.okezone.com/read/2019/05/10/340/2053795/imigrasi-entikong-bongkar-modus-baru-penyelundupan-manusia-ke-malaysia>).
- Radarkalbar.com. 2021. "Empat Tahun Ganti Rugi Lahan Belum Dibayar, Warga Entikong, Kalbar Surati Presiden - Kabar Sanggau." Diambil 2 Agustus 2021 (<https://kabar.sanggau.go.id/empat-tahun-ganti-rugi-lahan-belum-dibayar-warga-entikong-kalbar-surati-presiden/>).
- Rahatmawati, Istiana, dan Purbudi Wahyuni. 2012. "Sekilas perilaku masyarakat entikong (perbatasan indonesia- malaysia) dalam menghadapi bisnis global." *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta* 104.
- Rahmat, Agus; Ngadri; 2021. "Lahan Belum Dibayar, Jalan Antar Negara di Portal Ahli Waris." Diambil 25 Juli 2021 (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1368677-lahan-belum-dibayar-jalan-antar-negara-di-portal-ahli-waris>).
- Sudiar, Sonny. 2018. "Pendekatan Human Security dalam Studi Perbatasan Negara." *Jurnal Hubungan Internasional* 7(2). doi: 10.18196/hi.72139.
- Yosada, Richi Kardius. 2020. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5(2):148–59.
- Zulkifli; Latief, Abdul; Karmilia, Rise. 2017. "Resiko Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Dengan Model Kerja Sama Ekonomi Internasional." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6(1):59–70.